

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam

Nelly Kristina Wanti Sitorus, Lubna Salsabila²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam
email:pb171010053@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Law Number 7 of 1984 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination and Violence against Women. The purpose of this research is to describe in the Strategy of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Preventing Violence against Women in Batam City and to analyze the inhibiting factors in the Strategy of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Preventing Violence against Women in Batam City the type of research method used is descriptive research method with a qualitative approach using interview, observation, and documentation data collection techniques. The data sources of this researcher consist of primary data and secondary data. The results showed that the Strategy of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Preventing Women's Violence in Batam City was good but needed to improve the performance required by victims of violence against women. Based on the conclusions and results of the study, researchers used indicators from LAN-RI which were based on five indicators used as follows: Input Indicator (Input), Output Indicator (Output), Outcome Indicator (Results), Benefit Indicator (Benefit) and Impact Indicator (Impact) namely improving existing facilities and infrastructure at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Preventing Violence against Women in Batam City, Violence against women is increasing with news and news reports, counseling and socialization in preventing violence against women in Batam. Batam City, received facilities in the form of spiritual support, mentoring, felt protected, and demanded their rights, and the positive impact of preventing violence against women made victims feel safe with the facilities provided by the service from psychologists and assistance.

Keywords: *Strategy, Prevent, Tax on violence against women.*

PENDAHULUAN

Dinamika kependudukan yang ada di negara Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun. Dengan luas permukaan 1,92 juta kilometer persegi, Indonesia memiliki kepadatan penduduk 270,20 juta per September 2020, menurut data Sensus Penduduk 2020. Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan pertumbuhan penduduk sebesar 32,56 juta jiwa atau rata-rata 3,26 juta jiwa per tahun jika dibandingkan dengan Sensus

Penduduk 2010. Catatan sensus penduduk ini juga tidak terlalu baik karena jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga seluruh masyarakat Indonesia tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh pemerintah. bahwa perumbuhan semakin bertambah memeberikan tekanan yang berat, dan jika tidak tercegah maka mengakibatkan kemiskinan yang menghasilkan kesengsaraan dan kelaparan,

pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat maupun ekonomi.

Selain mempengaruhi kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, kekerasan terhadap wanita menjadi budaya sehingga sangat mudah seseorang melakukan kekerasan, tanpa alasan yang berarti. Seolah-olah kekerasan menjadi cara penyelesaian masalah tersebut. Fenomena kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) saat ini menjadi topik diskusi publik yang diliput baik di lingkungan akademik maupun media umum (Fadlurrahman, 2014). Meningkatnya jumlah penduduk harus seimbang dengan pengendalian yang dilakukan jika tidak akan menimbulkan ancaman yang berarti bagi perluasan kota, seperti yang diungkapkan Malthus dalam buku

(Priyono & Ismail, 2012), bahwa perumbuhan semakin bertambah memberikan desakan yang kuat, apabila kurangantisipasi akan berakibat pada terjadinya kemiskinan yang menghasilkan kemalangan dan kekurangan. Pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat maupun ekonomi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perempuan lebih rentan terhadap kekerasan karena status mereka yang lebih lemah. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di Indonesia setiap tahun berubah, sejalan dengan pola peningkatan jumlah insiden kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia setiap tahunnya.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Batam Pada Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah korban kekerasan perempuan
1	2017	48
2	2018	54
3	2019	44
4	2020	41
5	2021	40

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 2022)

Pada tahun 2017 tercatat 48 kasus kekerasan perempuan, diantaranya 38 kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sepuluh kasus Perdagangan Perempuan (*women trafficking*). Pada tahun 2018 jumlah tersebut meningkat menjadi sebanyak 54 kasus kekerasan perempuan, diantaranya empat puluh tujuh kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tujuh kasus perdagangan Perempuan (*women trafficking*). Pada tahun 2019 jumlah tersebut menurun menjadi sebanyak 44 kasus kekerasan perempuan, diantaranya 43 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan satu kasus perdagangan perempuan (*women trafficking*). Pada tahun 2020

jumlah tersebut meningkat lagi sebanyak 41 kasus kekerasan perempuan, diantaranya 2 kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan 39 kasus Perdagangan Perempuan (*women trafficking*). Pada tahun 2021 jumlah tersebut menurun sebanyak 40 kasus kekerasan perempuan, diantaranya 31 kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sembilan kasus Perdagangan Perempuan (*women trafficking*).

Menurut Pasal 27 UUD, setiap orang di Indonesia berada pada kedudukan yang sama. Penghapusan jenis diskriminasi terhadap perempuan ini diperlukan. Hal ini ditunjukkan dengan

cara berikut oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mengatur tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan: Pertama, negara ikut ambil bagian dengan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada perempuan laki-laki; Kedua, negara-negara peserta harus memberikan perempuan pendidikan hukum yang sama dengan laki-laki, kesempatan yang sama untuk mempraktikkan keterampilan tersebut, hak yang sama untuk membuat kontrak dan mengurus properti, dan tingkat perawatan yang sama dengan laki-laki. di semua tahap operasi mendatang Pengadilan dan Hakim; Ketiga, negara-negara peserta sepakat bahwa semua kontrak dan dokumen dengan kekuatan hukum yang bertujuan untuk membatasi kemampuan hukum perempuan harus dianggap batal demi hukum; Keempat, negara-negara peserta harus memberikan laki-laki dan perempuan hak yang sama sehubungan dengan undang-undang yang mengatur mobilitas orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan alamat mereka

Misalnya, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Komersial (PTPPO), dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanyalah beberapa dari undang-undang dan kebijakan yang telah diratifikasi pemerintah untuk mencegah dan mengelola kekerasan dalam tingkat yang signifikan (Sopianti, 2022).

Pencapaian pada sasaran organisasi yang sudah ditetapkan yang merupakan efektifitas. Efektifitas merupakan pekerjaan yang seberapa baik yang dilakukan, menghasilkan keluaran yang sudah ditetapkan oleh seseorang. Artinya, jika pekerjaan yang Menurut data (TribunBatam.id, 2021) yang di himpun hingga akhir tahun 2021, beberapa catatan menunjukkan angka kekerasan antara lain, kekerasan seksual tiga puluh tiga kasus, dengan

jumlah korban dewasa sembilan. Selanjutnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tiga puluh sembilan kasus dengan jumlah korban satu orang anak-anak dan tiga puluh delapan orang dewasa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sembilan kasus dengan jumlah korban tiga anak dan sembilan dewasa, eksploitasi ekonomi tujuh kasus dengan jumlah korban delapan belas anak dan lima dewasa. Lalu kekerasan fisik enam puluh tiga kasus dengan jumlah korban enam puluh anak dan tiga dewasa, penelantaran tiga kasus dengan jumlah korban empat anak, PMI Bermasalah (*Undocument* korban) dua puluh dua kasus dengan jumlah korban dua puluh dua orang dewasa..

Sebagaimana dengan yang diliput oleh (TribunBatam.id 2021) hingga akhir tahun 2021, beberapa catatan menunjukkan angka kekerasan antara lain, kekerasan seksual tiga puluh tiga kasus, dengan jumlah korban dewasa sembilan. Selanjutnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tiga puluh sembilan kasus dengan jumlah korban satu orang anak-anak dan tiga puluh delapan orang dewasa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sembilan kasus dengan jumlah korban tiga anak dan sembilan dewasa, eksploitasi ekonomi tujuh kasus dengan jumlah korban delapan belas anak dan lima dewasa. Lalu kekerasan fisik enam puluh tiga kasus dengan jumlah korban enam puluh anak dan tiga dewasa, penelantaran tiga kasus dengan jumlah korban empat anak, PMI Bermasalah (*Undocument* korban) dua puluh dua kasus dengan jumlah korban dua puluh dua orang dewasa.

Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemerintah menyikapi isu kekerasan terhadap perempuan di kota Batam berdasarkan kesulitan-kesulitan tersebut di atas. Peneliti mengubah judul penelitian menjadi "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Dalam Pencegahan

Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Batam”.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Strategi

Istilah "strategi" mengacu pada gagasan lama yang berasal dari bahasa Yunani *strategia*, yang berarti "seni atau ilmu para jenderal" (general), sang jenderal adalah panglima angkatan bersenjata. Strategi adalah rencana yang luas dan mencakup semua yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dalam menanggapi lingkungannya saat ini dan masa depan (Wijayanto, 2012). Ahmad A. Adnanputra yang merupakan pakar humas berdasarkan paparan ahli berisi judul *PR Strategy*, memberitahukan dalam strategi adalah bagian terpadu dan rencana selanjutnya dalam langkah-langkah sudah direncanakan disebut program kerja (Sari, 2012a). Menurut (Effendy, 2008), Strategi merupakan proses dalam perencanaan dan manajemen dalam mencapai satu tujuan. Pencapaian harus memiliki cara yang disesuaikan dengan keadaan di tujuan proses (Khalida & Dompok, 2019).

2. Indikator Kinerja

Pengukuran strategi dalam kinerja utama atau disebut IKU (Indikator Kinerja Alat Utama), jika membaca SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), kita akan melihat adanya IKU (Indikator Kinerja Utama) yang disebut juga KPIs *Key Performance Indicators*). Alat yang digunakan dalam mengukur dan memecahkan hal yang sulit untuk diukur dan masalah tertentu.

Indikator (ukuran) yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam Pemerintahan menurut LAN-RI dalam buku Teori Administrasi publik yang dikemukakan oleh (Pasolong, 2016) sebagai berikut:

a. *Input* (Masukan) adalah mengenai Sumber Daya Manusia dapat menghasilkan hasil dan juga keluaran yang secara langsung bekerja. Contohnya yaitu kuantitas,

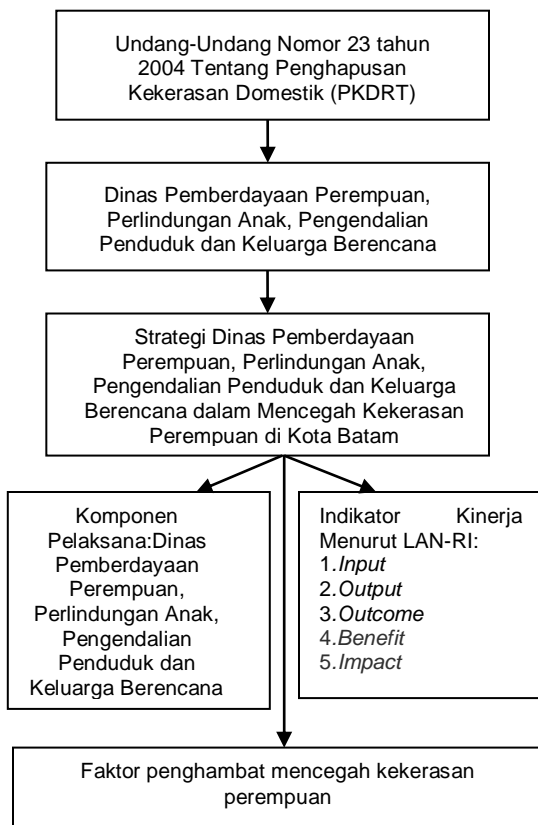
- kualitas dan kehematan.
- b. *Output* (Keluaran) adalah hasil yang didapatkan dari produk secara langsung, baik secara fisik maupun nonfisik yang menghasilkan dan pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah di rencanakan.
- c. *Outcome* (Hasil) adalah dampak yang di hasilkan dari hasil nyata, seperti ekonomi yang bertumbuh, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan lainnya.
- d. *Benefit* (Manfaat) adalah keuntungan dan hasil bermanfaat lainnya yang dapat dihasilkan bagi masyarakat oleh program dan kegiatan yang bersangkutan dengan output yang berfungsi secara optimal.
- e. *Impact* (Dampak) adalah dampak yang dapat menguntungkan dan merugikan bagi kemajuan masyarakat.

3. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang di lakukan oleh Ulya Armania, Rumzi Samin, dan Edy Akhyary Tahun 2021, yang berjudul Implementasi Program Cek Dare Kepri Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021, penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berisi Dilihat dari dimensi lingkungan dimana kebijakan yang dilaksanakan dari lingkungan sosial belum maksimal karena angka kekerasan di Kepulauan Riau semakin meningkat setiap tahunnya. Kesimpulannya adalah pelaksanaan program ini belum dapat berjalan secara optimal.
- b. Penelitian yang di lakukan oleh Lalu Fadlurrahman Tahun 2014, yang berjudul Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan, penelitian ini merupakan Deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berisi bahwa temuan penilaian keluaran program yang meliputi akses, cakupan, pelayanan, dan kesesuaian

program dengan kebutuhan, kinerja pelaksanaan RDU P2TPA efektif dalam mencapai tujuannya. Namun P2TPA RDU masih memiliki kendala dalam sosialisasi, khususnya bagi perempuan yang mengalami kekerasan di lingkungan (Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Sleman). P2TPA RDU juga kekurangan konselor, yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama bagi perempuan yang menjadi korban penyerangan.

4. Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Menurut (R Walter & Meredith, 1989) yang dikutip oleh (Sugiyono, 2015:7-8) mendefinisikan Karena didasarkan pada konsep postpositivis, metodologi penelitian kualitatif sekarang dikenal sebagai pendekatan postpositivistik karena popularitasnya baru-baru ini. Metode ini disebut juga metode interpretatif karena hasil penelitian lebih

erat kaitannya dengan interpretasi data lapangan, memungkinkan prosedur penelitian yang lebih artistik (kurang berpola). Teknik kualitatif dan metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini.

Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Jl.Raja Isa No.17, Gedung Kantor Bersama Pemko Batam LT. III Batam Center - Kota Batam dipilih oleh penulis sebagai lokasi penelitian untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi, peneliti mengandalkan dua jenis sumber data yang berbeda. Dalam penelitian ini sumber data yang di dapatkan Menurut (Sugiyono, 2016:193) yaitu sebagai berikut:

- 1) Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung, yaitu dari sumber tangan pertama. Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kota Batam menjadi sumber data utama penelitian ini yaitu Ibu Fisca Anggiana, SE. selaku Kabid Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan dan Bapak Dedy Suryadi, AKS, MH. selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda dan masyarakat yaitu Pak Joko dan Ibu Lina.
- 2) Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber selain sumber aslinya. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari majalah, buku, studi sebelumnya, situs resmi, dan makalah penting dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kota Batam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kota Batam. Salah satu

instansi daerah di pemerintahan Kota Batam adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Susunan Perangkat Daerah, yang meliputi susunan organisasi P3APPKB Kota Batam, uraian tugas, tugas, dan fungsi, serta sumber daya pelayanan dan kinerja pelayanan instansi P3APPKB Kota Batam. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kota Batam mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. fungsi, serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan amanatnya. Pelayanan P3APPKB dijalankan oleh seorang Kepala Dinas yang melapor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka melaksanakan kewajibannya.

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam.

Masalah publik yang menjadi perbincangan yaitu mengenai kekerasan perempuan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada perempuan di Kota Batam. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana menggunakan indikator strategis untuk membantu pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Batam adalah sebagai berikut :

1) *Input* (Masukan) adalah deskripsi sekilas mengenai Sumber Daya

Manusia yang akan langsung bekerja sehingga bisa menghasilkan *outcome* dan juga *output*. Contohnya adalah kualitas, informasi, peraturan per undang-undangan, dan sebagainya. Hasil penelitian yang diteliti ialah Alat pendukung ada yang rusak dan ada yang tidak rusak seperti kendaraan dinas seperti mobil keliling yang masih digunakan dan ada juga komputer yang belum terupdate yang baru atau sudah tua dan alat komunikasi yang masih sedikit bermasalah, Fasilitas yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam masih bagus tidak ada yang rusak, mengenai dinas itu melalui internet maupun yang saya dengar melalui berita, itupun saya tahu karna kasus kekerasan yang merajalela, dan masih ada masyarakat kurang tahu Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kota Batam saya tau adanya. Tapi tempatnya. Pembahasan dari peneliti adalah Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam masih bagus dan tidak ada yang rusak, akan tetapi adanya komputer yang sudah tidak terupdate yang sudah tua dan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mengetahui mengenai pencegahan perempuan di Kota Batam.

2) *Output* (Keluaran) adalah ukuran hasil (*output*) dari produk yang dihasilkan secara langsung, baik fisik dan nonfisik yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. kekerasan pada perempuan semakin bertambah dengan adanya berita dan berita kabar atau koran sehingga para korban kekerasan perempuan memiliki lima pendamping yang

berada di UPTD Sekupang dalam membantu korban dalam berbicara mengenai kekerasan yang dia alami dan ada juga psikolog yang menangani korban. Hasil penelitian yang diteliti adalah Dinas memiliki pendamping untuk ditindak lanjuti sampai ke polisi, terus di bawa ke UPTD untuk di temani oleh psikolog dan kasus kekerasan perempuan jadi semakin serius di Kota Batam apalagi pada zaman covid banyak yang bermasalah dengan ekonomi berujung kepada kekerasan pada istri. Pembahasan penelitian ialah Kekerasan pada perempuan semakin bertambah dengan adanya berita dan berita kabar atau koran sehingga para korban kekerasan perempuan memiliki lima pendamping yang berada di UPTD Sekupang dalam membantu korban dalam berbicara mengenai kekerasan yang korban alami dan ada juga psikolog yang menangani korban.

- 3) *Outcome* (Hasil) adalah hasil nyata yang berdampak terhadap masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan lain lain. Adanya perubahan positif yang terjadi sesuai dengan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi dalam mencegah kekerasan pada perempuan di Kota Batam. Hasil penelitian adalah Sudah sesuai dalam tujuan pencegahan dengan melakukan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan pada perempuan, kita kasih penyuluhan dan banyak lagi, Mereka tidak keluh mengenai pencegahannya, mereka malah menjadi senang dengan penyuluhan mengenai pencegahan pada perempuan, masyarakat pasti akan melapor bila terjadi kekerasan pada perempuan di lingkungan, dan masyarakat

seharusnya peka terhadap lingkungan, jangan cuek lah intinya jika terdapat kekerasan pada perempuan. Pembahasan ialah adanya perubahan positif yang terjadi sesuai dengan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi dalam pencegahan kekerasan perempuan di Kota Batam.

- 4) *Benefit* (Manfaat) adalah keuntungan serta aspek positif lainnya yang dapat dihasilkan oleh program dan kegiatan bersangkutan bagi masyarakat dengan berfungsinya keluaran secara optimal. Manfaat yang di rasakan oleh korban dan masyarakat mendapat fasilitas berupa dukungan spiritual, pendampingan, merasa di lindungi, dan menuntut haknya dengan di perlakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dengan melapor kepada polisi supaya di tindak lanjutin kasus kekerasan yang terjadi pada korban. Manfaat yang di rasakan oleh korban dan masyarakat mendapat fasilitas berupa dukungan spiritual, pendampingan, merasa di lindungi, dan menuntut haknya dengan di perlakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dengan melapor kepada polisi supaya di tindak lanjutin kasus kekerasan yang terjadi pada korban. Hasil penelitian adalah Manfaat yang dirasakan oleh korban menjadi mendapat dukungan spiritual, dapat pendampingan, terus mendapat bantuan dalam menuntut hak nya mengalami kekerasan, Manfaatnya membuat mereka merasa aman di dampingin oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam, Manfaat nya ya bagi kami para kaum perempuan rasa di lindungi dari

adanya dinas pemberdayaan perempuan dan pihak polisi, dan manfaatnya membuat masyarakat semakin terjagalah dari kekerasan yang sedang marak di Kota Batam. Pembahasan peneliti adalah manfaat yang di rasakan ole korban dan masyarakat mendapat fasilitas berupa dukungan spiritual, pendampingan, merasa di lindungi, dan menuntut haknya dengan di perlakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dengan melapor kepada polisi supaya di tindak lanjutin kasus kekerasan yang terjadi pada korban.

- 5) *Impact* (Dampak) adalah pengaruh positif dan negatif yang dapat muncul bagi pembangunan dan masyarakat secara keseluruhan dampak positif dari pencegahan kekerasan pada perempuan menjadi merasa aman dengan fasilitias yang di berikan dinas dari psikolog dan pendampingan. Dampak positif dari pencegahan kekerasan pada perempuan menjadi merasa aman dengan fasilitias yang di berikan dinas dari psikolog dan pendampingan. Hasil penelitian adalah Dampak positif dalam mencegah kekerasan perempuan di Kota Batam yaitu membuat korban kekerasan perempuan menjadi merasa aman dan kesehatan mental menjadi terjaga, Dampaknya ya membuat masyarakat yang menjadi korban merasa terbantu dengan psikologi dan fasilitas yang di berikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dampaknya bagi kami para masyarakat yang menjadi terbantu dari fasilitas yang di berikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dampak positif nya ya merasa aman ya jika pihak dinas, masyarakat dan polisi saling memberi informasi dan melakukan penyuluhan. Pembahasan penelitian adalah Dampak positif dari pencegahan kekerasan pada perempuan menjadi merasa aman dengan fasilitias yang di berikan dinas dari psikolog dan pendampingan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan indikator kinerja Menurut LAN-RI yaitu *Input* (Masukan), *Output* (Keluaran), *Outcome* (Hasil), *Benefit* (Manfaat) dan *Impact* (Dampak), maka di simpulkan bahwa:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam sarana dan prasarana masih bagus dan tidak ada yang rusak, akan tetapi adanya komputer yang sudah tidak *terupgrade* atau barang yang sudah tua serta alat komunikasi yang sedikit bermasalah.
2. Perlunya sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal sosialisasi ke seleruh lapisan masyarakat Kota Batam sehingga masyarakat Kota Batam paham mengenai kekerasan perempuan dan tempat pengaduan jika melihat tindak kekerasan perempuan yang ada di lingkungan sekitar.
3. Masyarakat masih kurang paham mengenai tindak kekerasan yang ada di lingkungan sekitar, masih kurangnya orang mengetahui mengenai pendampingan ketika terjadi kekerasan pada korban, dan masih banyak korban atau keluarga yang takut melapor ke pihak berwajib ketika menjadi korban kekerasan atau keluarganya yang menjadi korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, P. P. dan K. B. K. B. (2022). *Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Batam Pada Tahun 2017-2021*.
- Effendy, O. U. (2008). *Dinamika Komunikasi*. PT. Remaja

- Rosdakarya.
- Fadlurrahman, L. (2014). *Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan*. 18, 164–165.
- Khalida, & Dompok, T. (2019). *STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN RAWAT INAPDI PUSKESMAS BULANG KECAMATAN BULANG*.
- Pasolong, H. (2016). *Teori Administrasi Publik* (cetakan ke). ALFABETA, cv.
- Priyono, & Ismail, Z. (2012). *Teori Ekonomi* (hal. 15).
- R Walter, B., & Meredith, G. (1989). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Fifth Edition.
- Khalida, & Dompok, T. (2019). *Strategi Peningkatan Kualitas pelayanan Rawat Inapdi Puskesmas Bulang Kecamatan Bulang*.
- Priyono, & Ismail, Z. (2012). *Teori Ekonomi* (hal. 15).
- Sopianti, Y. (2022). *Implementasi Peran Dp3ap2kb Provinsi Ntb Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa*. 2–3.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
[https://doi.org/10.1016/S0969-4765\(04\)00066-9](https://doi.org/10.1016/S0969-4765(04)00066-9)
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- TribunBatam.id. (2021). *Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Masih Tinggi*.
- Wijayanto, D. (2012). *Pengantar Manajemen* (hal. 106).